

Judul : Wacana pemotongan gaji pejabat, setuju, Menteri, DPR bisa rasakan kesusahan rakyat
Tanggal : Jumat, 27 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Trending Topics

Wacana Pemotongan Gaji Pejabat

Setuju, Menteri, DPR Bisa Rasakan Kesusahan Rakyat

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung rencana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran imbas konflik Timur Tengah. Menurutnya, wacana ini sudah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait rencana efisiensi anggaran di tahun 2026.

"Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada kementerian dan lembaga untuk memotong anggaran-anggaran yang dianggap tidak perlu atau bisa ditunda. Bahkan, dirinya juga meminta agar kementerian dan lembaga membuat prioritas kebijakan yang bisa berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Namun begitu, pihaknya masih menghitung berapa besaran anggaran yang bisa ditekan untuk mengantisipasi dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Iran. "Tapi yang jelas kita juga hitung berapa sih defisitnya. Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma di design ke 2,68 persen dari PDB defisitnya," jelas Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sebelumnya telah menekankan pentingnya efisiensi sejak dini. Presiden juga minta jajarannya bersiap menghadapi kemungkinan tekanan ekonomi, meski situasi belum memasuki fase krisis.

Prabowo mencontohkan Pakistan yang telah menerapkan langkah ekstrem atau critical mea-

sures, seperti pengurangan hari kerja hingga pemangkasan gaji pejabat. "Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis, seperti dulu saat Covid-19," katanya.

Ketua Komisi II DPR Rifqin-izamy Karsayuda menilai wacana pemotongan gaji pejabat seperti anggota DPR RI, menteri, hingga wakil menteri, adalah cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan kepekaan terhadap potensi krisis atau sense of crisis. Wacana itu merupakan sinyal bagi seluruh pihak untuk menghadapi potensi krisis akibat dinamika global karena pe-
perangan di Timur Tengah.

"Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pasca perang di Timur Tengah itu tidak mudah. dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Politisi Partai NasDem itu mengingatkan, saat ini bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, melainkan juga meng-efektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan.

Selain itu, Rifqinizamy meminta Pemerintah memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, dia menyambut positif wacana pemotongan gaji tersebut.

Dia menilai, wacana kebijakan tersebut tidak memerlukan revisi undang-undang karena hal tersebut adalah hal teknis pemerintahan. "Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu peraturan Presiden atau bahkan hanya cukup peraturan Menteri Keuangan," sebutnya.

Di mana hal yang terpenting,

semua anggaran itu perlu dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Serta efisiensi itu harus menasar pada pos-pos yang tepat. "Jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Rifqinizamy.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira berpendapat, penghematan dari efisiensi gaji pejabat negara ini sangat tidak seberapa jika dibandingkan dengan potensi defisit fiskal imbas kenaikan harga minyak.

Dia menerangkan, potensi kenaikan harga minyak ini dapat menimbulkan tambahan anggaran subsidi hingga Rp 340 triliun. "Asumsi harga minyak bertahan di range 90-120 dolar Amerika Serikat per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja Pemerintah," ungkapnya.

Menurut Bhima, selain pemotongan gaji pejabat negara, sebaiknya Pemerintah juga memangkas tunjangan mereka. Kemudian pajak pendapatan alias PPh yang biasanya dibayarkan Pemerintah juga harus dicekualikan. Dengan begitu kebijakan efisiensi dapat memberikan dampak lebih meski masih jauh dari cukup.

"Pemangkasan gaji harus disertai pemangkasan tunjangan pejabat K/L. Kalau gaji dipangkas tunjangan masih besar percuma. Selain itu pajak PPh anggota DPR dan pejabat negara yang sebelumnya ditanggung pemerintah harus dicekualikan," tandasnya.

Terpisah, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyoroti perlunya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan gaji menteri. JK menilai bahwa

besaran gaji menteri saat ini relatif tidak tinggi jika dibandingkan dengan pejabat di lembaga lain.

Gaji menteri itu cuma sekitar Rp 19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?" katanya.

JK pun membandingkan besaran gaji menteri dengan gaji pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anggota DPR yang nilainya lebih tinggi. "Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ujarnya.

Dia menambahkan, menteri tidak menerima tunjangan seperti yang kerap dipersepsikan publik. Yang ada hanyalah biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas. "Tidak ada tunjangan. Hanya ada biaya operasional, itu saja," imbuhnya.

Di media sosial X, warganet mendukung wacana pemotongan gaji para pejabat seperti menteri, wakil menteri hingga staf khusus menteri. Pemotongan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kepekaan para pejabat terhadap kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat bawah.

Akun @TrisoTrisen menuturkan, tidak adil jika para pejabat menikmati gaji besar disaat banyak rakyat yang harus berjuang untuk makan sehari-hari.

"Potong saja gaji, tunjangan dan fasilitas super mewah yang dinikmati para pejabat itu. Masih banyak rakyat yang terpaksa jadi pemulung, pengemis, dan pengamen demi mengumpulkan uang receh buat sekedar makan hari ini," ujarnya.

Akun @daffanaaaa melihat, jangan sampai gaji pejabat malah menjadi beban keuangan bagi negara. "Kalau pemotongan gaji dan tunjangan menteri bisa jadi

solusi untuk mengatasi krisis skala nasional seperti saat ini, berarti dari awal sistem gaji dan tunjangan mereka sudah bermasalah. Dengan kata lain, gaji dan tunjangan menteri sudah kegedean dan jadi beban negara," sindirnya.

Akun @aifiles mengingatkan, pemotongan gaji harus sepaket dengan pemotongan tunjangan dan fasilitas. "Gaji menteri mah kecil. gaji semua menteri, wamen dan anggota DPR kalau dipotong gak bakal ngaruh ke penghematan anggaran. Sebab, yang besar itu tunjangannya, jika dihilangkan berarti juga mengurangi beban APBN," katanya.

Akun @ada5180 menyebutkan, selain menteri dan wakil menteri ada banyak staf khusus menteri yang gajinya besar. "Buat apa gaji menteri dipotong kalau staf khususnya juga banyak. Mending potong juga gaji staf khusus tersebut, terutama di kementerian yang programnya gak penting penting amat," sarannya.

Akun @Hyuga_2018 mendorong agar pemotongan gaji juga dilakukan kepada para pejabat di daerah. "Jangan hanya potong gaji menteri. Tetapi potong juga tunjangan dan gaji para pejabat daerah dan DPRD supaya mereka semakin sadar dengan kondisi masyarakatnya," ujarnya.

Akun @Masmujab22 berpendapat, seharusnya Pemerintah sudah melihat potensi kelebihan beban anggaran saat menambah jumlah kementerian. "Kok sekarang ada wacana potong gaji menteri. Coba dari dulu rampangkan saja kabinet. Jabatan wamen hanya untuk kementerian tertentu yang membutuhkan. Kalau begitu kan anggaran bisa dihemat dari awal," sindirnya. ■ OSP